BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 demi mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), berdasarkan prinsip transparansi, partisipasi, efektif dan efisien, akuntabel dan berkelanjutan, sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat, diperlukan manajemen strategis yang menempatkan organisasi pada titik yang strategis, terutama untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. (Rahayu, 2022).

Dalam pengelolaan tata pemerintahan, saat ini telah terjadi pergeseran paradigma dari *Government* ke *Governance*, dimana persoalan publik adalah urusan bersama antara pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha dalam hubungan yang bersendikan transparansi, akuntabilitas dan partisipatif. Apabila sendi-sendi dimaksud dipenuhi maka akan terwujud *Good Governance*. Tuntutan dan aspirasi masyarakat kepada penyelenggaraan pemerintahan yang baik membawa konsekuensi bahwa pemerintah harus menata diri untuk sebuah perubahan yang terarah pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Salah satu prinsip *good governance* adalah tata pemerintahan yang berwawasan ke depan, dimana setiap pelaksanaan kegiatan pemerintah di semua bidang dan tingkatan didasarkan pada visi, misi yang jelas dan jangka

waktu pencapaian serta strategi implementasi yang tepat sasaran dan akuntabel.(Dewi & Suparno, 2022).

Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang dituangkan di dalam rencana strategis organisasi yang merupakan perwujudan kewajiban instansi bersangkutan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan.(Santoso, 2013)

Anggaran merupakan salah satu komponen utama dalam melaksanakan suatu program agenda. Sebelum merealisasikan suatu program, sangat dibutuhkan perencanaan yang matang untuk mencapai tujuan dari program tersebut. Salah satunya anggaran. Di lingkungan pemerintah maupun sektor publik anggaran merupakan alat untuk mencapai target atau sasaran yang ingin dicapai pada periode tertentu.

Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh dewan perwakilan rakyat daerah. Pengaturan pada aspek perencanaan diharapkan agar seluruh proses penyusunan APBD semaksimal mungkin dapat menunjukkan latar belakang pengambilan keputusan dalam penetapan arah kebijakan umum, skala prioritas, dan penetapan alokasi serta distribusi sumber daya dengan melibatkan partisipasi masyarakat sehingga bisa menciptakan ekonomis, efektif dan efisien dalam menggunakan belanja daerah dengan *output* dan *income* yang jelas sesuai dengan prioritas pembangunan sehingga semua anggaran yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan secara transparansi kepada masyarakat luas. Dalam *line item budgeting* pengeluaran-pengeluaran yang tidak terukur secara jelas jumlah yang dikeluarkan, hanya sebatas pada

penambahan dan pengurangan anggaran berdasarkan anggaran pada tahun sebelumnya dan tidak adanya standar biaya yang jelas menyebabkan anggaran biaya ini kurang objektif dan rawan dimanipulasi.

Pemerintah daerah merupakan salah satu bentuk organisasi sektor publik yang mengatur jalannya pemerintah pada daerah tersebut, Seperti Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk yang sebagai sektor publik harus menyediakan layanan jasa untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakatnya, termasuk pada pengelolaan keuangan daerah dan menggunakan hasil dari pengelolaan tersebut untuk memaksimalkan potensi yang ada dan untuk meningkatkan pembangunan daerah. Agar mampu menjalankan perannya, daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraann pemerintah Negara.

Adanya desentralisasi pada pemerintah daerah dan tuntutan masyarakat akan transparansi dan akuntabilitas, maka pemerintah harus menyelenggarakan sistem pengelolaan keuangan yang dapat meningkatkan ekonomis, efektif dan efisien kinerja serta dilakukan secara tertib, taat pada peraturan dan bertanggungjawab. Program yang disusun berdasarkan anggaran kinerja prioritas yang berkaitan erat dengan visi, misi dan rencana strategis yang ingin dicapai. Sehingga hasil (*outcomes*) yang dicapai mencerminkan visi, misi suatu organisasi. Komponen anggaran berbasis kinerja adalah indikator kinerja, standar biaya dan pengukuran kinerja. Ketiga hal tersebut merupakan alat yang digunakan untuk menilai *input*, *output* dan

outcomes suatu program yang disusun berdasarkan kinerja untuk meningkatkan efektif dan efisien kinerja. Apabila efektif dan efisien kinerja telah tercapai maka akan tercipta akuntabilitas kinerja yang merupakan visi dari seluruh organisasi sektor publik.

Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) karena pada dasarnya laporan keuangan daerah adalah bagian dari sistem keuangan Negara yang setiap tahunnya tidak selamanya anggaran yang direalisasikan mengalami kenaikan atau penurunan yang signifikan. Anggaran memiliki peran penting sebagai alat stabilitas, distribusi, alokasi sumber daya publik, perencanaan dan pengendalian organisasi serta penilaian kinerja.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menyediakan berbagai informasi mengenai realisasi anggaran, pembiayaan, belanja dan lain sebagainya dan membandingkannya dengan jumlah anggaran di dalam suatu periode. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyediakan informasi mengenai anggaran dan realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas. (Majampoh & Datu, 2021).

Manfaat Laporan Relisasi Anggaran yaitu untuk menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan

anggarannya dan menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan instansi.

Sebagai perwujudan akuntabilitas terhadap pelaksanaan program kegiatan yang tercantum dalam Rencana Strategis, Bappeda berkewajiban membuat dan menyajikan Laporan Kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja dan sebagai alat untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasannya pada setiap akhir tahun anggaran. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Akuntabilitas Pemerintah.

Berikut data laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten nganjuk :

Tabel 1. 1
Data Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk

TAHUN	PENDAPATAN		Persentase	BELANJA		Persentase
	Anggaran	Realisasi		Anggaran	Realisasi	
2020	2.375,84 M	2.435,40 M	102.51%	2.568,65 M	2.383,28 M	92.78%
2021	2.134,37 M	2.608,44 M	122.21%	2.335,57 M	2.395,34 M	102.56%
2022	2.174,44 M	2.501,20 M	115.03%	2.430,99 M	2.665,21 M	109.63%
2023	2.302,59 M	2.687,33 M	116.71%	2.573,09 M	2.703,43 M	105.07%
2024	2.767,45 M	2.806,97 M	101.43%	3.119,20 M	2.813,30 M	90.19%

Sumber : djpk.kemenkeu.go.id

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan realisasi pendapatan dari tahun 2020-2024 terjadi selisih yang menguntungkan hal tersebut di karenakan pendapatan yang di peroleh daerah lebih besar atau melebihi dari target anggaran. Akan tetapi realisasi belanja dari tahun 2020 2024 terjadi selisih yang tidak menguntungkan hal tersebut terjadi karena nilai realisasi tidak mencapai atau melebihi dari anggaran atau kurang efisien.

Dalam hal ini analisis kinerja anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kabupaten Nganjuk sangat penting. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi gambaran mengenai laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Nganjuk secara efektif dan efisien dalam penggunaannya. Dengan demikian, makalah ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan anggaran belanja daerah.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020-2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2020-2024

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmu ekonomi, khususnya dalam bidang ekonomi pembangunan dan analisis kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi akademik untuk penelitian selanjutnya yang mengkaji kinerja keuangan pemerintah daerah. Selain itu, penelitian ini turut memberikan kontribusi dalam pengembangan teori yang berkaitan dengan kinerja Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD).

1.4.2 Manfaat Praktisi

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk dalam menganalisis kinerja keuangan. Informasi terkait selisih serta rasio efektivitas dan efisiensi dapat menjadi acuan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah demi tercapainya keberhasilan otonomi daerah.